e-issn: 2808-7011, p-issn: 2808-6996

Accredited: Sinta 5

# Kontribusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam Mencapai SDGs di Perkotaan

#### Nurul Fauziah

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

\*email corresponding author: <u>nurulfauziah657@gmail.com</u>

## **ABSTRACT**

The high poverty rate and limited social participation in urban areas are key reasons for selecting this community service topic. Urban regions such as Surakarta City, particularly Purwosari Village, face significant social challenges that demand the active involvement of local communities. The Family Welfare Empowerment group (PKK) exists to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The outcomes of PKK activities demonstrate that this empowerment group plays an active role in enhancing family education, health services, skills training, and the strengthening of social solidarity in urban settings. Furthermore, PKK serves as a platform for revitalizing social interaction in urban environments, which are often characterized by individualism, while also reinforcing community social capital. These findings affirm that PKK functions not only as a program implementer but also as a strategic agent of social change in advancing community-based sustainable development.

**Keywords:** Family Welfare Empowerment (PKK); community empowerment; SDGs; urban

## **PENDAHULUAN**

Jamaludin, (2017:6) menyebutkan masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan terikat oleh norma, nilai, serta sistem sosial yang membentuk keteraturan hidup. Interaksi antaranggota masyarakat menciptakan struktur sosial yang kompleks dan dinamis sesuai perkembangan zaman. Struktur masyarakat memiliki tatanan kelompok masyarakat yang saling berkaitan. Masyarakat diidentifikasi memiliki keterikatan erat dengan kelompok pemberdayaan yang berfungsi sebagai fasilitator meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi persoalan lokal secara bersama-sama (Lakoy et al., 2021).

Masyarakat yang tinggal di kota seringkali dikaitkan oleh sejumlah tantangan rumit seperti kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, kepadatan populasi, dan kriminalitas (Jamaludin, 2017:231). Situasi ini memerlukan dukungan dari kelompok yang berfokus pada pemberdayaan yang dapat menghubungkan antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Kelompok pemberdayaan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat supaya lebih mandiri, efisien, dan mampu bersaing di



tengah perubahan yang terjadi (Hidayatullah & Suminar, 2019), terutama di lingkungan masyarakat perkotaan.

Kota Surakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Solo merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa yang memiliki peranan vital dalam sejarah dan perkembangan sosial di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, kota budaya Surakarta waktu telah bertransformasi menjadi pusat pendidikan, ekonomi, dan pariwisata di daerah Jawa Tengah (Hakim et al., 2021). Namun, meskipun mengalami pertumbuhan, kota ini masih berhadapan dengan masalah sosial seperti kemiskinan. Merujuk pada data jumlah penduduk miskin di kota-kota Jawa Tengah tahun 2023, Surakarta mencatat sekitar 43,28 ribu individu yang hidup dalam kondisi miskin. Jika dibandingkan dengan kota lain di provinsi yang sama, angka ini merupakan yang kedua tertinggi setelah Kota Semarang yang mencapai 77,79 ribu orang. Di sisi lain, kota-kota lainnya seperti Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal menunjukkan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih sedikit, masing-masing berada di bawah angka 22 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kota	Tahun 2022	Tahun 2023
Kota Magelang	7,45	7,25
Kota Surakarta	43,89	43,28
Kota Salatiga	9,41	9,33
Kota Semarang	80,53	77,79
Kota Pekalongan	21,36	21,16
Kota Tegal	19,22	19,17

Sumber: diperoleh dari data primer

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2024) menyebutkan bahwa persebaran penduduk kurang mampu di tingkat kelurahan menunjukkan perbedaan yang jelas di seluruh wilayah kota. Kecamatan Laweyan menjadi salah satu area yang diperhatikan karena tercatat memiliki jumlah penduduk yang rentan terhadap risiko sosial berjumlah 21.551 jiwa pada tahun 2023, angka ini meningkat dari 6.282 jiwa yang tercatat pada tahun 2021. Kelurahan Purwosari menonjol dengan tingkat penduduk kurang mampu yang cukup tinggi di bandingkan dengan kelurahan lain dalam kecamatan tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya masalah sosial dan ekonomi yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan setempat.



# Al-Khidmcih Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 5 No. 2, 2025

Kemiskinan menjadi faktor penghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada di nomor pertama yaitu "Tanpa Kemiskinan" (No Poverty). Tingkat kemiskinan yang tinggi secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang baik, dan lingkungan yang bersih, yang semuanya merupakan komponen penting dari 17 tujuan SDGs (Nur Aini, 2021). Wilayah perkotaan sering kali dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang kurang memiliki rasa kepedulian sosial akibat tingginya mobilitas, individualisme, dan persaingan hidup yang kuat (Soekanto, 2013:106). Sehingga diperlukan kelompok pemberdayaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e-issn: 2808-7011, p-issn: 2808-6996

DOI: 10.56013/jak.v5i2.3989

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah inisiatif pemerintah secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui keterlibatan aktif dari masyarakat, terutama perempuan (Chandra et al., 2022). Organisasi ini berfungsi untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada keluarga dengan menekankan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan budaya sosial. PKK memiliki sepuluh program utama yang menjadi gerakan penting dalam kelompok pemberdayaan masyarakat yang dapat menjangkau pada tingkat keluarga rumah tangga, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Alfian, 2022). Sejalan dengan konsep pemberdayaan komunitas, yang menyatakan bahwa peningkatan keterlibatan individu dan kelompok dalam mengakses sumber daya untuk memecahkan masalah dapat berkontribusi pada pengendalian keputusan di masa mendatang (Moridu et al., 2023).

Penjelasan singkat diatas menjadikan peneliti tertarik untuk untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait kontribusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai kelompok pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di wilayah perkotaan, khususnya di Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

# **METODE**

Kegiatan pemberdayaan melalui PKK dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki secara mendalam peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai komunitas pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di daerah perkotaan khususnya pada Kelurahan Purwosari Laweyan. Sugiyono, (2018:208) menjelaskan bahwa studi kasus kualitatif bertujuan untuk menyelami secara rinci program, kejadian, proses, serta kegiatan yang sedang berlangsung. Melalui artikel ilmiah ini dapat memberikan wawasan kepada peneliti mengenai dinamika sosial dan strategi yang efektif sebagai cerminan peran yang diemban PKK melalui pendekatan partisipatif dan konteks lapangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan



dokumentasi, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang proses dan efek dari pemberdayaan yang dilaksanakan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sudiantini et al., (2023) pemerintah melaksanakan program pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi warganya melalui PKK ibu yang menjadi elemen kunci di setiap keluarga. Sejalan dengan inisiatif utama PKK yaitu Pemahaman dan Praktik Pancasila; Kerja Sama; Ketahanan Pangan; Pakaian; Tempat Tinggal dan Pengelolaan Rumah Tangga; Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan; Pengembangan Kooperasi; Perlindungan Lingkungan; serta Perencanaan Sehat. Walaupun PKK ini sebenarnya tidak secara langsung mengurangi kemiskinan, namun indikator kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas lainnya dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Hasil dari wawancara mendalam dengan salah satu pengurus PKK RW menunjukkan bahwa, "Ya, adanya PKK ini sangat membantu untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Namanya hidup bermasyarakt pasti tidak lepas dari itu. Perkumpukan ibu-ibu ini membantu menyukseskan program yang di berika oleh kantor keluraha yaitu seperti program posyandu rutin mulai dari bayi, remaja dan lansia. Di sini kalau posyandu remaja memang belum berjalan efektif tapi sudah ada dibuat susunan anggotanya. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar. Untuk pelatihan keterampilan ibu rumah tangga itu biasanya ada kegiatan dari pihak terkait seperti pemerintah lalu perwakilan saja yang ikut. Tapi saat perkumpulan PKK diadakan, ibu yang menjadi perwakilan tentu akan menjelaskan sedikit. Karena pasti setelah itu ada kegiatan lomab kebersihan desa, seperti itu".

Pengurus PKK RW menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam peran PKK RW harus didorong secara aktif, seperti yang diungkapkan, "Kami sebagai pengurus PKK tentunya terus berusaha melibatkan warga dengan cara langsung turun ke lapangan, menyosialisasikan kegiatan, dan membuka ruang diskusi agar adanya perasaan saling memiliki agar mau bergabung dalam masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan masyarakat yang ada. Karena setiap kegiatan yang ada tidak hanya berguna untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri juga".

Salah satu wakil pengurus PKK RT 3 menyatakan bahwa dalam mendukung inisiatif PKK RW, mereka memiliki tanggung jawab yang serupa dengan PKK RW. Menurutnya, "Sebagai bagian RW tentu memiliki peran yang sama untuk ikut membantu kegiatan seperti posyandu, menjadi salah satu perwakilan pelatihan, kesehatan, dan lainnya. Tapi banyak hal yang tidak bisa disamakan, karena di kota itu rata-rata para perempuannya sudah aktif bekerja. Sehingga kegiatan masyarakat seperti ini hanya bisa dilakukan saat tanggal merah atau malam hari. Terutama rata-rata ibu-ibu RT 3 ini banyak yang bekerja. Sehingga program yang ada ini dilakukan sekaligus diwaktu yang sama bersamaan dengan arisan PKK. Jadi, arisan PKK menjadi ajang curhat dan



saling bertukar informasi. Kalau untuk melakukan ini itu itu di hari dan jam kerja jadi kendala bagi RT 3. Sehingga solusinya memilih waktu yang pas yaitu kalau enggak di sore ya malam hari. Adanya

e-issn: 2808-7011, p-issn: 2808-6996

DOI: 10.56013/jak.v5i2.3989

Salah satu anggota PKK menyatakan bahwa salah satu motivasinya untuk terlibat aktif adalah, "Karena Saya ingin ada kegiatan bersama tentangga nggak cuma bekerja saja. Telebih adanya kegiatan PKK ini sedikit banyak membantu memberikan informasi kesehatan keluarga dan kegiatan lainnya. Terus bisa dibilang adanya grup PKK bisa membantu saya bisa mempromosikan jualan, kadang juga dibantu oleh para ibu-ibu lainnya membantu mempromosikan jualan ke rekannya. Multifungsi, hehehe (sambil tertawa)".

# 1) PKK sebagai Sarana Penguatan Relasi Sosial dan Solidaritas di Perkotaan

PKK ini memang membantu dan menjadi ajang saling berkomunikasi dan lainnya".

Masyarakat perkotaan biasanya dikenal dengan perilaku individualistik dan padatnya kegiatan (Muniri et al. 2021), adanya kegiatan PKK berfungsi sebagai alat penting untuk mengurangi keterasingan sosial. Aktivitas rutin seperti pertemuan bulanan, arisan, pelatihan, dan posyandu tidak hanya menyediakan ruang untuk berinteraksi, tetapi juga membantu mengembangkan hubungan emosional antarwarga. Dalam forum ini, para ibu rumah tangga memiliki platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan bahkan merundingkan solusi terkait masalah bersama seperti kesehatan keluarga, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. PKK juga secara aktif menggalakkan sikap saling peduli dan kerjasama, contohnya melalui kunjungan kepada warga yang sakit, memberikan bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan finansial, atau melakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan. Dapat dikatakan bahwa adanya PKK diperkotaan ini sangat bermanfaat terutama dalam memberikan ruang sosial yang memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di tengah masyarakat kota yang terus berubah mengikuti perkembangan.

Peran aktif masyarakat sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa keterlibatan individu sangat penting dalam proses pengambilan keputusan serta pembangunan sosial. Pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan, akses terhadap informasi, serta partisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dan solusi terhadap isu-isu yang ada dalam komunitas (Chandra et al., 2022). PKK tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat dilingkungan sekitar yang berfungsi membantu warga untuk mengenali, mengelola, dan memanfaatkan aset sosial yang ada. Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development) ini tidak hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki, tetapi menekankan pada kekuatan dan potensi yang telah ada dalam komunitas.

Adanya penggunaan aset dari komunitas itu sendiri seperti keterampilan para ibu rumah tangga, hubungan sosial di antara warga, dan fasilitas lokal (misalnya balai warga atau posyandu), PKK berperan sebagai platform untuk pembangunan yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Tindakan ini dapata mendorong kemandirian warga dalam



menciptakan solusi dari dasar (bottom-up) dan memperkuat kemampuan sosial secara bersamaan. Dukungan atas pemerintah pada program PKK ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal.

Berdasarkan hasil kegiatan pemberdayaan, peneliti menemukan bahwa adanya kelompok PKK ini memiliki peran penting dalam memperkuat modal sosial di komunitas perkotaan. Modal sosial diartikan sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendukung kolaborasi dan koordinasi untuk kepentingan bersama (Istikomah et al., 2022). PKK membangun ikatan sosial yang memperkuat hubungan antar anggota dalam masyarakat melalui kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok. Interaksi yang tercipta ini membentuk kepercayaan dan kerja sama yang mendorong solidaritas serta tanggung jawab bersama terhadap keadaan lingkungan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

# 2) Revitalisasi Komunitas melalui Program PKK untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat

Program yang dilaksanakan oleh PKK terbukti efektif dalam menghidupkan kembali komunitas di area perkotaan, khususnya dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aspek sosial. Tantang berat masyarakat urban yang kerap kali mengurangi partisipasi sosial, PKK hadir untuk menawarkan gerakan yang berguna mengembalikan interaksi sosial, rasa solidaritas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Adanya kegiatan PKK ini dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk terus aktif dalam kegiatan masyarakatan guna membangun masyarakat berkelanjutan. Keikutsertaan antar perempuan di lingkungan masyarakat urban tidak terbatas sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak yang turut merancang, mengorganisasi, dan mengevaluasi kegiatan.

Kegiatan PKK ini secara aktif membantu masyarakat urban membantu, mempertahankan dan menghadapi tantangan di era krisis Covid-19. Masyarakat kota yang tidak terbiasa bersikap individualisme, bergotong royong dengan sikap 'jogo tonggo' atau menjaga tetangga yang terlihat terkena virus ini. Meskipun pasien virus tidak bisa dijenguk, tetapi adanya support dan afirmasi positif dari lingkungan sekitar pada grup PKK ini membantu pasien Covid-19 dapat bangkit dan bertahan. Selain itu, hubungan kedekatan kelompok yang di revitalisasi melalui PKK di area urban membantu seseorang lepas dari kasus kekerasan rumah tangga, terlepas dari kasus kesehatan anak stunting dan lainnya.

#### **KESIMPULAN**

Temuan yang dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di lingkungan perkotaan. PKK telah menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif, terutama bagi perempuan melalui berbagai program yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga penguatan nilai sosial. Meskipun tidak secara langsung menghapus kemiskinan, keterlibatan PKK dalam



meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan relasi sosial, secara tidak langsung turut menurunkan indikator kemiskinan. Organisasi lingkup wilayah setempat ini berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang mengurangi isolasi, memperkuat solidaritas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirnya PKK membuat setiap orang memiliki perannya sebagai pelaksana program serta sebagai motor penggerak perubahan sosial yang berkelanjutan di tengah dinamika

e-issn: 2808-7011, p-issn: 2808-6996

DOI: 10.56013/jak.v5i2.3989

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

kehidupan kota.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pihak kelurahan dan tokoh masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan dan akses informasi yang sangat membantu. Terimakasih terdalam pada ibu-ibu PKK yang aktif dan tergerak pada PKK Kelurahan Purwosari Laweyan ini karena telah bekerja keras dan mau mendorong partisipasi aktif anggota lainnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat serta menjadi referensi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di wilayah perkotaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, M. (2022). Penerapan Augmented Reality (Tanaman Obat Keluarga) Toga Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Android Dengan Metode Marker. Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak, 3(1), 77–85. https://doi.org/10.33365/jatika.v3i1.1863
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu), 2023-2024. 2025. https://surakartakota.bps.go.id/id/statisticstable/2/NDAwIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsijawa-tengah--ribu-.html
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2024). Jumlah Penduduk Rentan Risiko Sosial Menurut 2025. https://surakartakota.bps.go.id/id/statisticstable/2/NDI3IzI=/jumlah-penduduk-rentan-risiko-sosial-menurut-kecamatan--jiwa-.html
- Chandra, B. R., Darwis, R. S., & Humaedi, S. (2022). Peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pencegahan stunting. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 4(2), 107–123.
- Hakim, L., Abdullah, I., & Sa'adah, N. (2021). Karakteristik Budaya Organisasi: Sebuah Studi Kualitatif terhadap Pengusaha Batik Muslim Laweyan Surakarta. Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 6(2), 1–24. https://doi.org/10.23917/benefit.v6i2.14019
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian.



- Nurul Fauziah: Kontribusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam Mencapai SDGs di Perkotaan
  - *Lifelong Education Journal*, 1(1), 1–11.
- Istikomah, I. D., Agiati, R. E., & Ilyas, A. E. (2022). Modal Sosial Pengurus Karang Taruna Dalam Menangani Kemiskinan Di Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos), 3(02), 88–107. https://doi.org/10.31595/lindayasos.v3i02.449
- Jamaludin, A. N. (2017). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. CV Pustaka Setia.
- Lakoy, S. K., Shirley Y.V.I. Goni, & Tampongangoy, D. (2021). Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung. MDK Juli, 5(17), 635–646.
- Moridu, I., Arisanjaya Doloan, Fitriani, Nurcahya Hartaty Posumah, Rini Hadiyati, Debiyanti Kune, & Rosfianti M. Yadasang. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Menangani Masalah Sosial. Eastasouth Journal *Effective* Community Services, 2(01), 42 - 53. https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01.143
- Muniri., Mahsun., Aziz, N. C. (2021). Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman. 4, 1–20.
- Nur Aini, A. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(1), 77-91. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.147
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (B. Sulistyowati (ed.); Budi Sulis). PT Raja Grafindo Persada.
- Sudiantini, D., Priatna, W., & Meutia, K. I. (2023). Social entrepreneurship management: PKK moms' poverty alleviation strategy. Jurnal Inovasi Dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat, 1(2), 90-97. https://doi.org/10.61650/jip-dimas.v1i2.234
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi (Y. Yuniarsih (ed.); Cetakan 1). CV Alfabeta.

